



RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERIODE 2017 – 2021**

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2017**



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Buku Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 - 2021 telah dapat disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 - 2021.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman ini memberikan gambaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Semoga Buku ini menjadi acuan dalam menjalankan Program dan Kegiatan setiap tahunnya selama periode lima tahun ke depan.

Parit Malintang, 6 Maret 2017
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



ZAHIRMAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda. NIP. 19710524 199703 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional pada pasal 15 ayat 2 dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Kemudian Undang-undang tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana disebutkan bahwa Rencana strategis OPD atau Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Sejalan dengan itu, Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program OPD dengan mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan OPD. Oleh karena itu, sejalan dengan proses penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021, Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai salah satu OPD pendukung pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dalam hal fasilitasi dan melayani Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman baik secara administrasi maupun secara teknis turut menyusun rencana pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam periode Tahun 2017-2021.

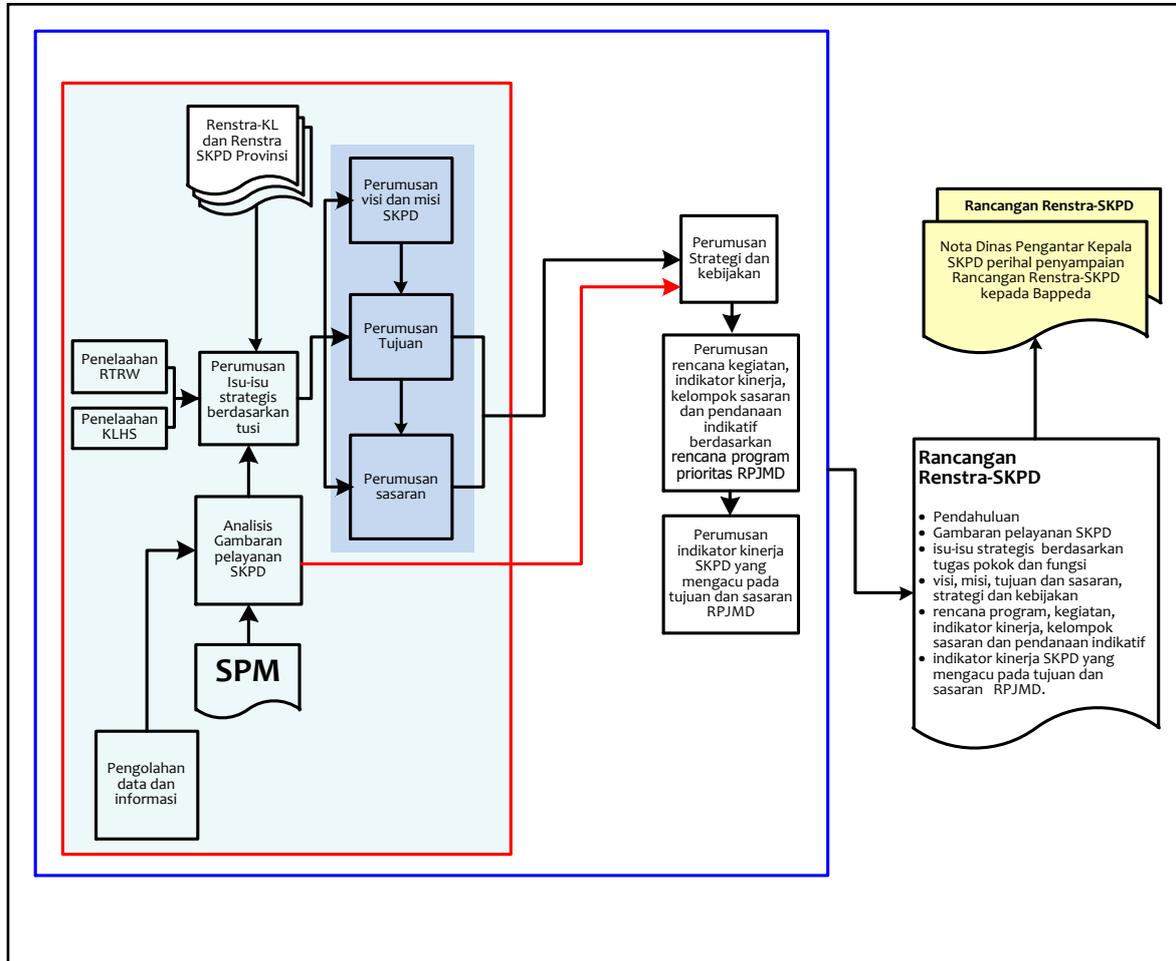
RPJM memperhatikan kebutuhan dan kepentingan antar rencana pembangunan dikaitkan dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. RPJM perlu mempertimbangkan kepentingan pelaku pembangunan dalam kaitan kerjasama dengan pemerintahan daerah. RPJM berisi kebijakan umum dan keuangan, strategi pembangunan, program satuan kerja, lintas satuan kerja dan program kewilayahan. Renstra OPD berisi program dan kegiatan yang seterusnya menjadi Renja OPD berdasarkan tugas, fungsi, peran sesuai urusan pemerintah daerah. RKPd disusun berdasarkan RPJM dan sebagai pertimbangan dalam menyusun Renja OPD seterusnya sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Ketekaitan Renstra OPD dengan RPJMD dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Renja OPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, sehingga Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu lima tahunan.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021 adalah dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika. Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan merujuk pada RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
20. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 59 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud disusunnya Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021 adalah untuk:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Renja OPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Dinas Komunikasi Dan Informatika maupun lingkup Kabupaten Padang Pariaman;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Dinas Komunikasi Dan Informatika agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
6. Bahan Evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan tahun



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021 adalah untuk :

1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Komunikasi Dan Informatika.

1.4. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Permenkominfo no.22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika dari Kabupaten/Kabupaten SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan, namun SPM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman hingga saat ini belum ada.

1.5. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kunci adalah indicator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat 4 (empat) IKK yang berkaitan dengan jurusan Komunikasi dan Informatika, yakni:

1. Jumlah jaringan komunikasi, dengan Formula Jumlah jaringan telepon genggam/stasioner;
2. Rasio wartel/warnet-terhadap penduduk dengan formula (Jumlah wartel/warnet ; Jumlah penduduk) x 100;
3. Jumlah surat kabar nasional/local dengan formula Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah;



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

4. Jumlah penyiaran radio/TV lokal dengan formula Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke daerah

1.6. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Padang Pariaman memuat :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika, fungsi Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Komunikasi Dan Informatika, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menjelaskan ketentuan mengenai standar pelayanan minimal dinas Komunikasi dan Informatika.

1.5. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika

Menjelaskan tentang Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika

1.6. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Komunikasi Dan Informatika (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman.

Memuat penjelasan tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman..

2.3. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian ini menjelaskan susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.4. Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman

Bagian ini menjelaskan Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.

2.5. Sarana dan Prasarana pendukung

Bagian ini menjelaskan Sarana dan Prasarana pendukung yang menunjang kelancaran pekerjaan asn dinas komunikasi dan informatika.

2.6. Gambaran Pelayanan Dan Kinerja Yang Menjadi Sasaran

Bagian ini menjelaskan Gambaran Pelayanan Dan Kinerja Yang Menjadi Sasaran Potensi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika

Bagian ini menjelaskan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika

2.8. Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD

Bagian ini menjelaskan bagaimana Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD

2.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Bagian ini menjelaskan Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra SKPD

2.10. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD

Memuat penjelasan tentang tindak lanjut salah satu rekomendasi KLHS, yakni pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya dengan arah kebijakan pengendalian keamanan data dan informasi layanan (Aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) yang dilaksanakan melalui program Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi SKPD

Menjelaskan analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD lima tahun mendatang

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Bagian ini menjelaskan realisasi pencapaian sasaran pembangunan Bupati Padang Pariaman yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Kominfo Dan Renstra Diskominfo Provinsi

Pada bagian ini menjelaskan tentang Beberapa pergeseran yang perlu dicermati dan dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra 2017-2021 Bidang Komunikasi dan informatika baik di tingkat Kementrian, provinsi dan Kabupaten

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini menjelaskan tentang penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra SKPD

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Menjelaskan tentang Isu-isu strategis yang akan dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika pada rentang waktu 2017-2021.

BAB IV Visi dan Misi

4.1. Visi Dan Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Komunikasi Dan Informatika

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi Dan Informatikabeserta indikator kinerjanya

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika. Dinas Komunikasi adalah Organisasi Perangkat Daerah Tipe A adalah Dinas Kabupaten yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, paling banyak 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

2.2. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman.

Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang dijelaskan pada BAB II Pasal 2 (dua) mengenai kedudukan dan susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Komunikasi dan informatik statistik dan persandian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
4. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- b. perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/ atau
- f. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.3. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Susunan Organisasinya terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Subbagian, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi 3 (tiga) Seksi:
 - a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 - b. Seksi Layanan Informasi Publik; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.
4. Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi, membawahi 3 (tiga) Seksi:
 - a. Seksi Pengembangan Infrastruktur Jaringan;
 - b. Seksi Keamanan Informasi; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Teknologi Informasi.
5. Bidang Layanan E-Government, membawahi 3 (tiga) Seksi:
 - a. Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - b. Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government; dan
 - c. Seksi Tata Kelola E-Government.
6. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi 3 (tiga) Seksi:
 - a. Seksi Pengolahan Data;
 - b. Seksi Statistik Daerah; dan
 - c. Seksi Persandian.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

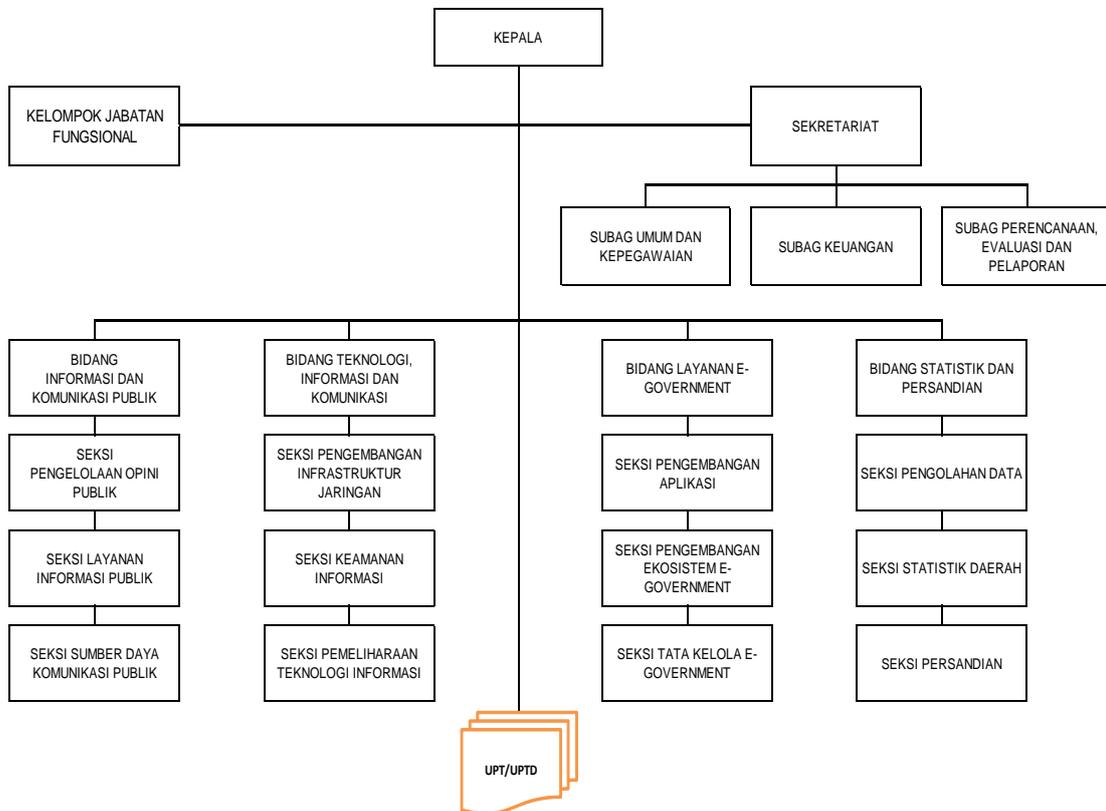


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Padang Pariaman

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Lampiran I Peraturan Bupati Padang Pariaman
Nomor : 59 Tahun 2016
Tanggal : 20 Desember 2016



2.4. Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika perlu didukung oleh Sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana (asset) dan sarana pendukung lainnya.

1. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 adalah sebanyak 25 orang.

b. Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 adalah sebagai berikut :



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2017.

No.	Keterangan	Jumlah
A.	ASN	
1.	Sekolah Dasar (SD)	0 Orang
	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0 Orang
	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	3 Orang
	Diploma III (D III)	0 Orang
	Strata 1 (S1)	12 Orang
	Strata 2 (S2)	10 Orang

2. Pangkat dan Golongan.

Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2017

No	Pangkat / Golongan	Tahun 2017
A.	PNS	
1.	Pembina Utama Madya / IV d	-
2.	Pembina Utama Muda / IV c	1 Orang
3.	Pembina Tingkat I / IV b	1 Orang
4.	Pembina / IV a	1 Orang
5.	Penata Tingkat I / III d	7 Orang
6.	Penata / III c	5 Orang
7.	Penata Muda Tingkat I / III b	7 Orang
8.	Penata Muda / III a	1 Orang
9.	Pengatur Tingkat I / II d	-
10.	Pengatur / II c	2 Orang



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

11.	Pengatur Muda Tingkat I / II b	-
12.	Pengatur Muda / II a	-
	Jumlah PNS	25

3. Pejabat Struktural

Berdasarkan Eselon Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan eselon Tahun 2017

Eselon				JUMLAH
I	II	III	IV	
-	1	5	15	21

4. Fungsional.

Berdasarkan jenis jabatan fungsional, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman terdapat 1 (satu) jenis jabatan fungsional yaitu di UPT Media Center, tetapi sampai Tahun 2017 belum memiliki pejabat fungsional.

5. Jenis Kelamin.

Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

No	Jenis Kelamin	Tahun 2013
1	Laki-laki	20
2	Perempuan	5
	Jumlah	25

2.5. Sarana dan Prasarana pendukung

Untuk memperlancar tugas pokok yang terfokus pada pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika serta peningkatan minat dan budaya informasi, Dinas Komunikasi dan



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Informatika Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh sarana serta prasarana seperti yang dijelaskan didalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017

No	Jenis Inventaris	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kendaraan Dinas	2	1	1	-	-
2	Roda 4	-	-	-	-	-
3	Mobil PLIK	-	-	-	-	-
4	Sepeda Motor	4	2	-	2	-
5	Server	4	4	-	-	-
6	Komputer	1	1	-	-	-
7	Note Book	3	-	-	3	-
8	Komputer	1	-	1	-	-
9	UPS	3	3	-	-	-
10	Meja Biro Besar	21	21	-	-	-
11	Meja ½ biro Filling kabinet 4 laci	4	2	2	-	-

3. Sumber Pembiayaan

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya, sumber pembiayaan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman selain dari APBD Kabupaten Padang Pariaman, juga bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat (melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat) dan APBN (melalui Departemen Komunikasi dan Informatika RI).

4. Sumber Daya Jaringan Kerja

Perluasan jaringan kerja yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman secara formal ditempuh melalui:

- Saluran vertikal, yaitu dengan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) RI maupun dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Barat.
- Kemitraan, yaitu dengan Lembaga Penyiaran Publik yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, kelompok komunikasi sosial dan dunia usaha serta organisasi nirlaba yang bergerak di sektor komunikasi dan informatika.



2.6. Gambaran Pelayanan Dan Kinerja Yang Menjadi Sasaran

2.6.1. Potensi Pelayanan.

A. Diseminasi (penyebaran) informasi

Salah satu permasalahan dalam bidang komunikasi dan informatika yaitu masih adanya masyarakat yang kesulitan dalam mengakses informasi, khususnya masyarakat perdesaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi antara masyarakat perdesaan dan masyarakat perKabupatenan.

Sehubungan hal di atas, potensi pelayanan yang menjadi sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika kedepannya dalam penyebaran informasi secara spesifik dititikbertakan pada masyarakat perdesaan/nagari.

B. Pemberdayaan masyarakat dan Kemitraan

Selain penyebaran informasi, pelayanan bidang komunikasi dan informatika harus dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tersebut didasarkan pada kesejajaran peran sehingga pemberdayaan yang dilakukan bersifat kemitraan. Adapun yang menjadi potensi sasaran dalam pelayanan pemberdayaan yang didasarkan pada kemitraan yaitu kelompok masyarakat atau lembaga media komunikasi dan informatika yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat diantaranya lembaga penyiaran dan kelompok kesenian yang komunikatif.

C. Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi

Bentuk pelayanan lainnya yang direncanakan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah diorientasikan kepada ketersediaan jaringan teknologi komunikasi dan informasi (TI). Hal ini terkait dengan semakin meningkatnya pemakaian internet oleh masyarakat Padang Pariaman dan dinas/instansi baik vertikal maupun otonom di Kabupaten Padang Pariaman. Selain hal di atas, ketersediaan jaringan diperuntukan pula untuk interkoneksi antar SKPD di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga terwujudnya pelayanan publik dan e-government.

D. Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Komunikasi dan Informatika.

Ketersediaan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika baik kualitas maupun kuantitas untuk



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

kedepannya merupakan salah satu hal yang mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman. Sasaran pelayanan SDM ini secara internal ditujukan untuk meningkatkan kualitas PNS sebagai pengelola komunikasi dan informatika, baik untuk lingkungan Dinas Kominfo maupun dinas instansi lainnya, serta pelayanan untuk menjadi pejabat fungsional Pranata Kehumasan.

Sedangkan secara eksternal diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola informasi, khususnya informasi yang diterima. Hal ini berkaitan dengan derasnya informasi sebagai dampak dari globalisasi informasi, sehingga diharapkan masyarakat mempunyai kemampuan untuk menyeleksi informasi yang positif dan negatif. Peningkatan kualitas masyarakat sebagaimana di atas, diarahkan pula untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya manfaat penerapan teknologi informatika.

E. Rekomendasi dan Perijinan

Pelayanan yang juga direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas Kominfo, yaitu mengenai pemberian rekomendasi dan perijinan yang terkait dengan kegiatan Pos dan Telekomunikasi. Hal ini sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007, mengenai Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten. Adapun pemberian rekomendasi dan perijinan tersebut meliputi:

a. Pos dan Telekomunikasi

- Pos
 1. Pemberian ijin jasa titipan untuk kantor agen;
- Telekomunikasi
 1. Pemberian ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya di Daerah sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
 2. Pemberian ijin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
 3. Pemberian ijin kantor cabang dan loket pelayanan operator.

b. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1. Rekomendasi Penyelenggaraan menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
 2. Pemberian ijin *Hinder Ordonantie* (Ordonansi Gangguan);
 3. Pemberian ijin instalasi penangkal petir;
 4. Pemberian ijin instalasi genset.
- c. Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Radio
1. Evaluasi persyaratan Adm dan data teknis;
 2. Rekomendasi kelengkapan data Adm dan Data teknis persyaratan permohonan izin penyelenggaraan radio;
 3. Izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan televisi.

2.7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dinas Komunikasi Dan Informatika, adalah OPD yang baru terbentuk pada tahun 2017. Meskipun tergolong OPD baru, namun sudah terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan dan belum optimalnya kinerja OPD. Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika, antara lain :

Tantangan :

1. Dinas Komunikasi Dan Informatika harus mampu berkeja dalam keterbatasan dana, sarana dan prasarana.
2. Dinas Komunikasi Dan Informatika harus mampu merencanakan kebutuhan penganggaran yang berbasis kinerja dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya;
3. Keterbatasan Anggaran Daerah untuk memenuhi semua kebutuhan program kerja mengharuskan Dinas Komunikasi Dan Informatika harus jeli dan efektif dalam merencanakan kegiatan untuk memenuhi pelayanan dibidang Komunikasi dan Informatika;
4. Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government;
5. Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi;
6. Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi;
7. Jaminan keamanan sistem TIK;
8. Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat;
9. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berbasis kinerja sesuai dengan Nawacita Presiden RI;

Peluang :

1. Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi OPD baru.



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

2. Kesempatan yang luas bagi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan maupun pelatihan yang terkhususkan pada bidang komunikasi dan informatika melalui pelatihan, bintek dan workshop dan konsultasi/koordinasi.
3. Non Lembaga maupun institusi pendidikan di Padang Pariaman yang bergerak di bidang TIK;
4. Regulasi/peraturan yang mengatur pengembangan TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi, Open Source;
5. Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan TIK,
6. Partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM, Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat;
7. Penyelenggaraan statistik sektoral;
8. Penerapan Fungsi GPR (Government Public Relations);
9. Sarana dan prasarana Komunikasi penunjang operasional pemerintah, Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Selain itu, untuk pengembangan pelayanan SKPD, juga perlu dilakukan sejumlah analisis/telaahan terhadap dokumen lain yang akan mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kedepannya.

2.8. Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD

Hubungan secara substansi yang ada dalam Renstra Kemenkominfo, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman terdapat benang merah yang saling terkait, sebagaimana dalam tabel;

Tabel 2.6 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Pariaman terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Kemenkominfo

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinkominfo	Sasaran pada Renstra Diskominfo Provinsi	Sasaran pada Renstra Kemenkominfo
1	2	3	4	5
1	1. Parsentase OPD yg telah mengimplementasikan Government dengan baik	Meningkatnya Pengelolaan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis E-Government	Meningkatnya Diseminasi informasi dan Keterbukaan Informasi Publik	E-government
2	1. Parsentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang telah mengimplementasikan teknologi informasi dengan tepat guna	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	Keterbukaan informasi publik
3	1. Peningkatan Keterbukaan Informasi publik;	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang Berkualitas		



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinkominfo	Sasaran pada Renstra Diskominfo Provinsi	Sasaran pada Renstra Kemenkominfo
1	2	3	4	5
4	1. Persentase data daerah yang tersedia; 2. Parsentase Gangguan Keamanan Sistem Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan Pengamanan Informasi		
5	1. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika; 2. Nilai evaluasi LAKIP; 3. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti; 4. Turunnya Temuan BPK/ Inspektorat; 5. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Prima Bidang Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		

1.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra SKPD. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Padang Pariaman, Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam RTRW berperan pada Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi , yakni:

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan;
2. Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi;
3. Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel pada berbagai kawasan fungsional di Padang Pariaman.

Gambaran hubungan RTRW dengan fungsi pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel:



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Tabel 2.7 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Pariaman

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	2	3	4	5	6
1	Pengembangan Jaringan Kabel	Belum terintegrasi dan tertata dengan baik	Pengembangan Pelayanan jaringan telepon kabel	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), Jasa pos dan telekomunikasi	Padang Pariaman
2	Pengembangan jaringan nirkabel	Belum terintegrasi dan tertata dengan baik	Pengembangan penggunaan menara Telekomunikasi bersama	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Padang Pariaman
			Pengawasan dan pengaturan pembangunan BTS	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Padang Pariaman
3	Pengembangan sistem telekomunikasi untuk publik	Telah ada sistem komunikasi publik, namun tingkat partisipasi masyarakat belum optimal	pengembangan sarana dan prasarana pendukung system teknologi Telekomunikasi yang dapat diakses publik dengan mudah	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Padang Pariaman

1.10. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD

Program Kabupaten yang diturunkan menjadi program SKPD dalam Renstra SKPD telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan Awal RPJMD. Alternatif dan rekomendasi yang diberikan oleh dokumen KLHS telah ditindaklanjuti dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2016-2021 yang telah disahkan menjadi Perda. Dinas Komunikasi dan Informatika, memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya dengan arah kebijakan pengendalian keamanan data dan informasi layanan (Aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) yang dilaksanakan melalui program Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel:



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 2.8 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Padang
Pariaman Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1	2	3	4	5
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	-	-	-
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	-	-	-
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya	Dinkominfo memiliki kewajiban untuk turut serta melakukan monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi Berbahaya	Selama ini pengawasan dan monitoring telah dilaksanakan, namun masih terkendala dalam kewenangan
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	-	-	-
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	-	-	-
6	Tingkat ketahanan dan potensikeanekaragaman hayati	-	-	-



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang Dinas untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi dinas Komunikasi dan Informatika, terdapat permasalahan yang digambarkan pada tabel:

Tabel 3.1 Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

Aspek Kajian	Capaian/Ko ndisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
			(KEWENANG AN SKPD)	(DILUAR KEWENANGA N SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan SKPD	Dalam pelaksanaan dan perlu, pengkajian hingga penyempur naan	RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2017-2021	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	Lembaga maupun institusi pendidikan di Padang Pariaman yang bergerak di bidang TIK	Implementasi SOP belum Optimal
Renstra Diskominfo provinsi Sumatera Barat	Padang Pariaman telah memiliki 10 saluran komunikasi publik	Renstra Diskominfo provinsi Sumatera Barat	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Implementasi SOP belum Optimal
Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	Padang Pariaman telah memiliki 6 aplikasi yang mendukung pelayanan publik.	Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	Lembaga maupun institusi pendidikan di Padang Pariaman yang bergerak di bidang TIK	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi Masyarakat
RTRW Kabupaten Padang Pariaman	Penataan struktur sistem jaringan telekomunika si belum optimal	RTRW Kabupaten Padang Pariaman	Pengembangan infrastruktur TIK	Lembaga maupun institusi pendidikan di Padang Pariaman yang bergerak di bidang TIK	Legalitas Penyelenggara an Jasa Pos dan Telekomunikasi
KLHS RPJMD Kabupaten	Monitoring untuk pembatasan	KLHS RPJMD Kabupaten Padang	Kewenangan dalam menangani	Legalitas Penyelenggaran Jasa Pos dan	jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
			(KEWENANGAN SKPD)	(DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Padang Pariaman tahun 2016-2021	terhadap akses informasi berbahaya rutin dilakukan setiap bulan	Pariaman tahun 2016-2021	TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi	Telekomunikasi	

Dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD lima tahun mendatang maka didapatkan sejumlah rumusan isu strategis, sebagaimana yang tersajikan dalam tabel:

Tabel 3.2 Rumusan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
1	-	Penerapan Fungsi GPR (Government Public Relations)	Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan TIK	Komitmen pimpinan dalam pengembangan TIK
2	-	Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat	Sarana dan prasarana Komunikasi penunjang operasional pemerintah	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi
3	-	sistem pengamanan data dan Jaringan TIK (firewall, portgate, co- location, ISO)	Penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK
4	-	jaminan keamanan sistem TIK	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	Komposisi PNS dan tenaga OS
5	-	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Pengembangan infrastruktur TIK	Distribusi infrastruktur jaringan
6	-	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government	-
7	-	-	pengelolaan website Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi	-
8	-	-	Lembaga maupun institusi pendidikan di Padang Pariaman yang bergerak di bidang TIK	-
9	-	-	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	-



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
10	-	-	kapasitas sarana dan prasarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintah	-

Isu-isu yang teridentifikasi pada tabel di atas saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satunya adalah isu strategis tentang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK tentang bagaimana mensosialisasikan layanan publik yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat agar mereka mau memanfaatkannya, diperlukan pengelolaan komunikasi dan informasi kepada khalayak yang berkaitan dengan Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan Fungsi GPR (Government Public Relations).

Selain bersifat peluang, isu strategis juga dapat menjadi ancaman bila tidak diantisipasi terutama jika potensi ancaman tersebut berasal dari permasalahan internal. Salah satunya adalah permasalahan masih kurangnya jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK. Hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan banyaknya Lembaga maupun institusi pendidikan di Padang Pariaman yang bergerak di bidang TIK.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Di samping sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Komunikasi Dan Informatika juga sebagai pelaksana urusan yang turut merealisasikan pencapaian sasaran pembangunan Bupati Padang Pariaman yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Dimana Visinya adalah **“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang baru, religius, cerdas dan sejahtera”**.

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik;
4. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan;
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan,



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik;

7. Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana;

Dalam menjalankan peran Dinas Komunikasi Dan Informatika terhadap Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, dapat dikaitkan secara khusus pada pencapaian **Misi ke-6:** Kepala Daerah yakni *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik”*, dengan melaksanakan **Tujuan ke-2:** *“Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan”* terhadap **pencapaian Sasaran ke 2:** *“Meningkatnya Pelayanan Publik yang bersih, prima, aspiratif dan partisipatif”* dan dengan **indikator** *“Persentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Berbasis Teknologi Informasi”*.

Dalam pelaksanaan pemerintahan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja adalah :

1. Perubahan aturan perundang-undangan atas penyelenggaraan Pemerintah;
2. Budaya kerja dan disiplin aparatur;
3. Mekanisme kerja yang tepat dan konsisten;
4. Ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas;
5. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung;
6. Ketersediaan anggaran yang mencukupi;
7. Harmonisasi dan sinergisitas antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan tugas dan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo Dan Renstra Diskominfo Provinsi.

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021 yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika perlu mempertimbangkan terjadinya permasalahan, faktor pendorong dan penghambat, yaitu pergeseran paradigma yang terjadi dalam teknologi informasi dan komunikasi, serta media yang berimbas pada model bisnis dan juga regulasi serta kebijakan yang terkait. Beberapa pergeseran yang perlu dicermati dan dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra 2017-2021 Bidang Komunikasi dan informatika baik di tingkat Kementerian, provinsi dan Kabupaten dapat dilihat pada tabel 3.3. dan 3.4 :



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra Kemenkominfo beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik
2	Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan	Distribusi infrastruktur jaringan	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Pengembangan infrastruktur TIK
3	Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan Aman	Implementasi SOP tentang tata kelola informasi internal belum terselenggara	kapasitas sarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintah	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi
4	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien	Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government	Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Diskominfo	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya diseminasi	Belum terlaksananya	Implementasi SOP	Kemampuan



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Diskominfo	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	informasi dan keterbukaan informasi publik	Penerapan Fungsi GPR (Government Public Relations) secara Menyeluruh	belum optimal	Integrasi sistem Pelayanan publik
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kemampuan Integrasi sistem Pelayanan publik
3	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government	Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik
4	Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	Distribusi infrastruktur Jaringan	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Pengembangan infrastruktur TIK

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra SKPD. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam RTRW berperan pada Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi , yakni:

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan;
2. Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi;
3. Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel pada berbagai kawasan fungsional di Kabupaten Padang Pariaman

Dalam penerapan strategi tersebut, terdapat sejumlah permasalahan, maupun faktor pendorong dan penghambat yang dapat dilihat pada tabel 3.5 :



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 3.5 Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan Telekomunikasi	jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	Lembaga maupun institusi pendidikan di Padang Pariaman yang bergerak di bidang TIK
2	Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	Lembaga maupun institusi pendidikan di Padang Pariaman yang bergerak di bidang TIK
3	Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel pada berbagai kawasan fungsional di Kabupaten Padang Pariaman	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Distribusi infrastruktur jaringan	Pengembangan infrastruktur TIK

Program Kabupaten yang diturunkan menjadi program SKPD dalam Renstra SKPD telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan Awal RPJMD. Alternatif dan rekomendasi yang diberikan oleh dokumen KLHS telah ditindaklanjuti dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2017-2021 yang telah disahkan menjadi Perda. Dinas Komunikasi dan Informatika, memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya dengan arah kebijakan pengendalian keamanan data dan informasi layanan (Aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) yang dilaksanakan melalui program Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dalam penerapan Rekomendasi tersebut, terdapat sejumlah permasalahan, maupun faktor pendorong dan penghambat yang dapat dilihat pada tabel 3.6:



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas Dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya	jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Kewenangan Dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2017-2021 antara lain:

No. Isu Strategis

1. Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik
2. Pengembangan infrastruktur TIK
3. Implementasi e-Government
4. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK

Padang Pariaman memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan publik pada untuk 429.000 penduduknya. Agar pelayanan publik dapat diberikan dengan efektif dan efisien, maka dukungan TIK sangat dibutuhkan. Dukungan tersebut tidak hanya terbatas sampai pada front office saja, namun juga dibutuhkan integrasi pada sistem back office nya sehingga didapatkan rumusan isu strategis yaitu terintegrasinya berbagai sistem pelayanan baik untuk masyarakat Kabupaten Padang Pariaman maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Implementasi e-Government yang mulai berkembang di Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir dinilai oleh pihak pusat sebagai provinsi yang berhasil dengan baik. Namun secara substantif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-Government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

Pengembangan sistem pelayanan publik yang terintegrasi tentunya membutuhkan dukungan infrastruktur yang tidak sedikit. Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, juga harus diikuti dengan pengoptimalan infrastruktur yang ada, agar tidak membebani anggaran



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

mengingat Kabupaten juga masih memiliki program-program prioritas yang harus dilaksanakan, seperti pendidikan dan kesehatan sehingga didapatkan rumusan isu strategis yaitu perlunya pengembangan Jaringan informatika dan Jaringan telekomunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK.

Pengembangan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan didukung dengan infrastruktur yang memadai, tentunya tidak akan optimal tanpa adanya partisipasi dari masyarakat untuk memanfaatkan. Dalam pengembangan sistem pelayanan publiknya Pemerintah Kabupaten juga harus mempertimbangkan kemudahan pemanfaatannya agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sehingga didapatkan rumusan isu strategis yaitu Mengoptimalkan saluran komunikasi publik untuk mendorong masyarakat memanfaatkan layanan berbasis TIK yang telah disediakan.



BAB IV

VISI DAN MISI

4.1 Visi Dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, isu strategis dan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Padang Pariaman, maka disusun rumusan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

VISI

Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dalam jangka panjang. Pada rencana tahun 2016-2021, Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Komunikasi dan Informatika Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Padang Pariaman Sebagai Smart City yang Religius dan Sejahtera.”

Visi di atas memiliki empat kata kunci penting yang akan diwujudkan melalui RPJMD Kabupaten Padang Pariaman ke depan. Adapun pengertian empat kunci tersebut adalah:

- Terwujud efektivitas dan efisiensi Komunikasi dan Informatika, adalah terciptanya pusat pelayanan Informasi bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman terutama dalam mengakses data yang memerlukan Informasi baik yang menyangkut kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Dengan pemahaman ini akhirnya diharapkan akan terwujud masyarakat yang mengerti dan memahami Informasi dalam berbagai kebijakan pemerintah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Religius memiliki makna masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- Sejahtera memiliki arti sebuah kondisi tercapainya taraf kehidupan yang layak dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
- “Smart City” Konsep kota cerdas ini mengetengahkan sebuah tatanan kota yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

MISI

Melalui Visi Dinas Komunikasi dan Informatika di atas, maka dirumuskan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan Kualitas infrastruktur Informasi dan Komunikasi yang Berbasis Teknologi;
2. Meningkatkan kualitas dan standarisasi sistem informasi yang terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi dan sistem keamanan informasi;
4. Mewujudkan ketersediaan data statistik yang komprehensif dan terbaru.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi OPD dan memiliki keterkaitan dengan visi Dinas Komunikasi dan Informatika yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini:



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3
Optimalisasi Jaringan Teknologi Informasi Daerah	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang telah mengimplementasikan teknologi informasi dengan tepat guna
	Meningkatnya Pengelolaan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis E-Government	Persentase OPD yg telah mengimplementasikan Government dengan baik
Optimalisasi Pengelolaan Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan Pengamanan Informasi	Persentase data daerah yang tersedia
		Persentase Gangguan Keamanan Sistem Informasi
Optimalisasi Peran Pusat Informasi Daerah Untuk Keterbukaan Informasi Daerah	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang Berkualitas	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi publik
Optimalisasi serta Aktualisasi Kualitas Aparatur Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana
	Meningkatnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya aparatur Meningkatnya pelaksanaan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Aparatur yang dilatih Persentase Laporan Tepat waktu



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBUJAKAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
Berkembangannya infrastruktur jaringan	Persentase Pengembangan Infrastruktur Jaringan	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah (IKU)	Meningkatkan sistem serta sarana prasarana pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Peningkatan pemanfaatan TIK untuk pelayanan public	Parsentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang telah mengimplementasikan teknologi informasi dengan tepat guna (IKU)
Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Persentase Pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis e-government		Mengembangkan dan memanfaatkan system informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)	Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	
Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang Berkualitas (IKU)	Meningkatkan keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi public	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (IKU)



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
Peningkatan kapasitas pengelolaan layanan data statistik dan keamanan informasi	Ketersedi sistem data dan statistik yang terintegrasi dan keamanan informasi	Meningkatnya pelayanan data dan Pengamanan Informasi	Meningkatkan pengelolaan layanan data statistik daerah dan Keamanan Aset Informasi	Peningkatan penyediaan data statistik sektoral dan Keamanan Aset Informasi	Persentase data daerah yang tersedia



BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program dan kegiatannya dengan berkonsentrasi pada pencapaian Misi ke-6 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, yaitu “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui pembinaan aparatur dan pelayanan publik*”.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika pada adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
3. Program Kerjasama Informasi dengan mas media;
4. Program Persandian untuk Pengamanan Informasi;
5. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
9. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Program Dinas Komunikasi Dan Informatika yang mengacu pada program prioritas RPJMD tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang diembannya. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pada tabel dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Optimalisasi Jaringan Teknologi Informasi Daerah	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Parsentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang telah mengimplementasikan teknologi informasi dengan tepat guna	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Outcome: Persentase Cakupan Jangkauan Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	788,300,000	25%	4,550,000,000	55%	6,575,000,000	75%	5,642,500,000	95%	5,906,750,000
			Pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan jaringan	Output: Jumlah Penanganan kaduan Gangguan Jarkom	50 Instalasi/jaringan	54,150,000	Semua OPD Kab. Padang Pariaman	150,000,000	Semua OPD Kab. Padang Pariaman	165,000,000	Semua OPD Kab. Padang Pariaman	181,500,000	Semua OPD Kab. Padang Pariaman	199,650,000
			Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi	Output: Jumlah jaringan LAN/WAN OPD dan UK yang dibangun	9 OPD	680,000,000	Semua OPD Kab. Padang Pariaman	350,000,000	Semua OPD Kab. Padang Pariaman	385,000,000	Semua OPD Kab. Padang Pariaman	423,500,000	Semua OPD Kab. Padang Pariaman	465,850,000
			Penyediaan Jasa Bandwith/Internet Daerah	Output: Jumlah Kecepatan Akses Internet OPD dan UK			300 Mb	3,200,000,000	450 Mb	3,520,000,000	450 Mb	3,872,000,000	450 Mb	4,259,200,000
			Pembangunan Network Operation Center	Output: Persentase kaduan Gangguan Jarkom yang terselesaikan			1 NOC	100,000,000	NOC yang terpelihara	110,000,000	1 NOC	121,000,000	NOC yang terpelihara	133,100,000
			Pengembangan Infrastruktur data center	Output: Kapasitas Server Penyimpanan Data			1 Data Center	200,000,000	1 Data Center	220,000,000	1 Data Center	242,000,000	1 Data Center	266,200,000
Meningkatnya Pengelolaan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis	Parsentase OPD yg telah mengimplementasikan Government dengan baik	Pembangunan Comand Centre Padang Pariaman	Output: Jumlah aplikasi yang terintegrasi			1 Pusat Pelayanan e-gov terpadu	300,000,000	1 Pusat Pelayanan e-gov terpadu	1,900,000,000	Pengembangan Pelayanan e-gov terpadu	500,000,000	Pengembangan Pelayanan e-gov terpadu	250,000,000	
		Pembinaan layanan e-Government	Jumlah Dokumentasi Regulasi Pengelolaan Teknologi	1 Regulasi	54,150,000	1 Regulasi	150,000,000	2 Regulasi	165,000,000	2 Regulasi	181,500,000	2 Regulasi	199,650,000	



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	an E-Governm ent			Informasi										
			Pengembangan e-Gov dan Implementasi Smart City Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Jumlah OPD dan UK yang telah menggunakan SPBE			1 Sistem terintegrasi	100,000,000	Pembinaan Sistem terintegrasi	110,000,000	Pembinaan Sistem terintegrasi	121,000,000	Pembinaan Sistem terintegrasi	133,100,000
Optimalisasi Pengelolaan Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan Pengamanan Informasi	Persentase data daerah yang tersedia	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Outcome: Persentase Data dan Statistik Sektor yang tersedia	15%	204,600,000	15%	235,000,000	25%	258,500,000	35%	284,350,000	50%	312,785,000
			Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik	Output: Jumlah Dokumen Data Statistik Sektor yang dihasilkan	1 Dokumen	122,950,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	181,500,000	1 Dokumen	199,650,000
			Layanan Satu Data Padang Pariaman	Output: Persentase updating Data OPD secara online	5%	81,650,000	10%	85,000,000	15%	93,500,000	20%	102,850,000	30%	113,135,000
		Persentase Gangguan Keamanan Sistem Informasi	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	Outcome: Persentase Sistem Informasi Daerah yang telah memiliki keamanan informasi	15%	341,650,000	15%	700,000,000	25%	770,000,000	35%	847,000,000	50%	931,700,000
			Fasilitasi sistem informasi dan persandian	Output: Persentase Sistem Informasi yang memiliki Sertifikat Elektronik	5%	191,650,000	5%	85,000,000	25%	93,500,000	45%	102,850,000	60%	113,135,000
		Penyediaan Colocation Server	Output: Jumlah Kapasitas Disaster Recovery System			1 Rak Server	200,000,000	2 Rak Server	220,000,000	2 Rak Server	242,000,000	2 Rak Server	266,200,000	



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Keamanan Sistem Informasi	Output: Persentase Aset informasi yang sesuai standar keamanan	5%	150,000,000	10%	250,000,000	15%	275,000,000	20%	302,500,000	25%	332,750,000
			Pengawasan dan pengendalian Sarana telekomunikasi	Output: Jumlah Tower, Stasiun Radio/Televisi, Wartel/Warnet			140 Menara	165,000,000	140 Menara	181,500,000	140 Menara	199,650,000	140 Menara	219,615,000
Optimalisasi Peran Pusat Informasi Daerah Untuk Keterbukaan Informasi Daerah	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang Berkualitas	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi publik	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Outcome: Jumlah jenis pelayanan informasi dan komunikasi publik	5 Jenis	236,650,000	5 Jenis	500,000,000	5 Jenis	550,000,000	5 Jenis	605,000,000	5 Jenis	665,500,000
			Pembinaan dan pengembangan sumber daya informasi masyarakat	Output: Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibentuk dan dibina	11 Kelompok Informasi Masyarakat	35,000,000	20 Kelompok Informasi Masyarakat	150,000,000	30 Kelompok Informasi Masyarakat	165,000,000	35 Kelompok Informasi Masyarakat	181,500,000	40 Kelompok Informasi Masyarakat	199,650,000
			Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Output: Jumlah implementasi keterbukaan informasi Badan Publik seluruh Instansi Pemerintah	Tersedianya informasi Publik	201,650,000	Tersedianya informasi Publik	350,000,000	Tersedianya informasi Publik	385,000,000	Tersedianya informasi Publik	423,500,000	Tersedianya informasi Publik	465,850,000
			Program kerjasama informasi dengan mass media	Outcome: Jumlah jenis pelayanan informasi dan komunikasi publik	10 Jenis	35,000,000	10 Jenis	1,200,000,000	10 Jenis	1,095,000,000	10 Jenis	1,199,500,000	10 Jenis	1,274,450,000
			Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Output: Jumlah layanan informasi melalui media massa	Publikasi 24 Program	35,000,000	Publikasi 24 Program	300,000,000	Publikasi 24 Program	330,000,000	Publikasi 24 Program	363,000,000	Publikasi 24 Program	399,300,000
			Diseminasi informasi pembangunan daerah	Output: Jumlah layanan informasi melalui media luar ruang			24 Unit Baliho, 48 lembar spanduk	200,000,000	24 Unit Baliho, 48 lembar spanduk	220,000,000	24 Unit Baliho, 48 lembar spanduk	242,000,000	24 Unit Baliho, 48 lembar spanduk	266,200,000



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kerjasama dengan media massa elektronik dan On-line	Output:Jumlah layanan informasi melalui media massa			Kejasama dengan 17 Media elektronik/ Online	400,000,000	Kejasama dengan 17 Media elektronik/ Online	440,000,000	Kejasama dengan 17 Media elektronik/ Online	484,000,000	Kejasama dengan 17 Media elektronik/ Online	532,400,000
			Supporting Media Center	Output: Jumlah pusat informasi daerah yang tersedia			1 Media Center Porprov 2018	250,000,000	1 Media Center Porprov 2018	50,000,000	1 Media Center Porprov 2018	50,000,000	1 Media Center Porprov 2018	10,000,000
			Fasilitasi Kunjungan Jurnalistik Kependidikan Kabupaten Padang Pariaman	Output: Jumlah Kunjungan Jurnalistik Kependidikan Kabupaten Padang Pariaman			10 wartawan	50,000,000	10 wartawan	55,000,000	10 wartawan	60,500,000	10 wartawan	66,550,000
Optimalisasi serta Aktualisasi Kualitas Aparatur Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	390,000,000	91%	445,000,000	91%	489,000,000	92%	537,375,000	93%	590,561,250
			Penyediaan jasa surat menyurat	Output: Terbayarnya alat tulis kantor, peranko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan	1 tahun	30,000,000	1 Tahun	40,000,000	1 Tahun	44,000,000	1 Tahun	48,400,000	1 Tahun	53,240,000
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output: Terbayarnya layanan telepon, air, listrik, faksimili dan internet	1 tahun	5,000,000	1 Tahun	-						
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output: Terlaksananya Pembayaran honor PA, KPA, Bendahara dan PPTK	1 tahun	140,000,000	1 tahun	150,000,000	1 tahun	165,000,000	1 tahun	181,500,000	1 tahun	199,650,000
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output: Terpeliharanya kebersihan kantor dan tersedianya	1 tahun	20,000,000	1 tahun	30,000,000	1 tahun	33,000,000	1 tahun	36,300,000	1 tahun	39,930,000



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				jasa tenaga kebersihan kantor										
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	15,000,000	1 Tahun	15,000,000	1 tahun	16,500,000	1 Tahun	18,150,000	1 tahun	19,965,000
			Penyediaan makanan dan minuman	Output: Tersedianya makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor	1 tahun	30,000,000	1 Tahun	35,000,000	1 tahun	38,500,000	1 Tahun	42,350,000	1 tahun	46,585,000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output: Terlaksananya kegiatan konsultasi/ koordinasi Dinas KOMINFO	1 tahun	150,000,000	1 Tahun	165,000,000	1 tahun	181,500,000	1 Tahun	199,650,000	1 tahun	219,615,000
			Pengadaan Alat-alat Listrik dan Elektronik	Output: Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik			1 tahun	10,000,000	1 tahun	10,500,000	1 tahun	11,025,000	1 tahun	11,576,250
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome: Persentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	91%	166,400,000	92%	350,000,000	93%	472,000,000	94%	609,125,000	94%	763,781,250
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Output: Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	1 tahun	52,400,000	1 tahun	150,000,000	1 tahun	225,000,000	1 tahun	337,500,000	1 tahun	506,250,000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output: Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas kantor	1 tahun	84,000,000	1 tahun	100,000,000	1 tahun	110,000,000	1 tahun	121,000,000	1 tahun	133,100,000



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output: Terlaksananya Pemeliharaan berkala Gedung kantor	1 tahun	15,000,000	1 tahun	25,000,000	1 tahun	27,500,000	1 tahun	30,250,000	1 tahun	33,275,000
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Output: Terlaksananya Pemeliharaan berkala perlengkapan Gedung kantor	1 tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	29,500,000	1 Tahun	35,000,000	1 Tahun	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Output: Terlaksananya Pemeliharaan berkala peralatan kantor	1 tahun	15,000,000	1 tahun	25,000,000	1 tahun	27,500,000	1 tahun	30,250,000	1 tahun	33,275,000
			Pengadaan Meubiler Kantor	Output: Tersedianya Meubelir kantor			1 tahun	50,000,000	1 Tahun	52,500,000	1 tahun	55,125,000	1 Tahun	57,881,250
	Meningkatnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang dilatih	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome: Persentase Peningkatan Kapasitas SDM dibidang informatika	92%	25,000,000	92%	185,000,000	92%	203,500,000	92%	223,850,000	92%	246,235,000
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Output: Terlaksananya kegiatan bintek, sosialisasi dan implementasi perundang undangan bagi Dinas KOMINFO	1 tahun	25,000,000	1 tahun	75,000,000	1 tahun	82,500,000	1 tahun	90,750,000	1 tahun	99,825,000
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output: Terlaksananya kegiatan Peningkatan SDM Dinas Kominfo			1 Paket Kegiatan	110,000,000	1 Paket Kegiatan	121,000,000	1 Paket Kegiatan	133,100,000	1 Paket Kegiatan	146,410,000
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Outcome: Persentase Peningkatan Disiplin SDM					92%	14,000,000	92%	15,000,000	92%	15,000,000



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				dibidang informatika										
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Output: Tersedianya pakaian seragam daerah					42 ASN	14,000,000	45 ASN	15,000,000	45 ASN	15,000,000
	Meningkatnya pelaksanaan Capaian Kinerja SKPD	Persentase Laporan Tepat waktu	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Outcome: Cakupan layanan Pelaksanaan Pelaporan hasil Kegiatan	Dokumen Perencanaan	35,000,000	Dokumen Perencanaan	45,000,000	Dokumen Perencanaan	80,000,000	Dokumen Perencanaan	90,000,000	Dokumen Perencanaan	90,000,000
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan / Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja SKPD (Laporan Keuangan, Lakip, LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja per Bulan) yang disusun	Laporan, dan Dokumen CAPKIN OPD	35,000,000	Laporan, dan Dokumen CAPKIN OPD	45,000,000	Laporan, dan Dokumen CAPKIN OPD	30,000,000	Laporan, dan Dokumen CAPKIN OPD	35,000,000	Laporan, dan Dokumen CAPKIN OPD	35,000,000
			Penyusunan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja SKPD	Jumlah Rencana Kerja (Renja, RKT, Renstra) Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Anggaran (RKA dan DPA Awal, RKA dan DPA Perubahan) yang disusun	Laporan, dan Dokumen Rencana Kerja		Laporan, dan Dokumen Rencana Kerja		Laporan, dan Dokumen Rencana Kerja	50,000,000	Laporan, dan Dokumen Rencana Kerja	55,000,000	Laporan, dan Dokumen Rencana Kerja	55,000,000
TOTAL BELANJA LANGSUNG							2,222,600,000		8,210,000,000		10,507,000,000		10,053,700,000	10,796,762,500



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2017-2021

Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021, maka untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah tersebut, Dinas Komunikasi Dan Informatika telah menyusun tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya dalam rangka mensukseskan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi/urusan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab 3 mengenai telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di atas, terdapat hubungan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

Ukuran untuk menilai capaian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika terhadap RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017-2021 adalah terletak pada perbandingan antara target indikator kinerja RPJMD yang menjadi urusan Dinas Komunikasi Dan Informatika dengan realisasi yang dicapai pada tahun pelaksanaan perencanaan, sebagaimana juga telah dilakukan revisi terhadap RPJMD dan mengacu kepada Misi Kepala Daerah yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021

STRATEGI	ARAH KEBUJAKAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						
			KONDISI AWAL	2016	2017	2018	2019	2020	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK PELAYANAN UMUM									
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB									
10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
Meningkatkan sistem serta sarana prasarana pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Peningkatan pemanfaatan TIK untuk pelayanan public	Persentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang telah mengimplementasikan teknologi informasi dengan tepat guna (IKU)	5% (10 OPD)	5% (10 OPD)	35% (44 OPD)	50% (44 OPD, 16 UPT)	65% (44 OPD, 16 UPT, 50 Nagari)	75% (44 OPD, 16 UPT, 103 Nagari)	100% (44 OPD, 25 UPT, 103 Nagari)
Mengembangkan dan memanfaatkan system informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)	Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		0%	10%	20%	50%	75%	95%	100%
Meningkatkan keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi public	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (IKU)	Peringkat 5	Peringkat 3	Peringkat 2	Peringkat 1	Peringkat 1	Peringkat 1	Peringkat 1



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

STRATEGI	ARAH KEBUJAKAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						
			KONDISI AWAL	2016	2017	2018	2019	2020	KONDISI I AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK PELAYANAN UMUM									
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB									
10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
Meningkatkan pengelolaan layanan data statistik daerah dan Keamanan Aset Informasi	Peningkatan penyediaan data statistik sektoral dan Keamanan Aset Informasi	Persentase data daerah yang tersedia	25%	35%	50%	65%	85%	95%	100%
		Persentase Gangguan Keamanan Sistem Informasi	1%	3%	5%	5%	10%	15%	20%



BAB VII **PENUTUP**

Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika. Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Dan Informatika, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan.

Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Komunikasi Dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika periode 2017-2021 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021.

Selanjutnya keberhasilan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang turut mengemban kesuksesan rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder pembangunan. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.